

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan ini diuraikan perihal mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang penelitian menjelaskan mengenai perihal yang menyebabkan penelitian ini menarik untuk dilaksanakan. Perumusan masalah menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dijelaskan. Tujuan penelitian membahas mengenai hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian adalah hal-hal yang diharapkan akan diperoleh dengan tercapainya tujuan penelitian ini. Sistematika penulisan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan penulisan laporan penelitian yang berbentuk skripsi.

1.1 Latar Belakang Masalah

Perencanaan audit berupa penyusunan program audit yang berisi tujuan, langkah-langkah/prosedur, petugas, prediksi waktu yang dibutuhkan. Khususnya untuk pengawasan yang bersifat audit investigatif diharapkan mampu menghasilkan *output* Laporan Hasil Audit Investigatif (LHAI) yang berkualitas. Dalam perencanaan audit juga ditentukan mengenai anggaran dan personil yang dibutuhkan. Masalah umum dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah yang hampir dihadapi oleh setiap organisasi adalah anggaran dan sumber daya manusia yang tidak mencukupi. Hal tersebut juga menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan Audit investigatif di Provinsi Sumatera Barat.

Banyaknya permintaan penugasan audit investigatif yang harus dilaksanakan tidak selaras dengan jumlah auditor yang relatif terbatas dan jumlah

dana yang juga terbatas. Kondisi ini, khususnya untuk penugasan yang audit investigatif, mengakibatkan perlunya perencanaan atas sumber daya yang baik sehingga waktu dan dana digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai audit investigatif yang berkualitas. Dalam prakteknya, rencana audit yang telah ditetapkan dalam audit investigatif dapat mengalami perbedaan dalam pelaksanaannya.

Perkembangan penugasan audit investigatif mungkin mengharuskan auditor investigatif untuk memperluas audit, merubah jangka waktu audit, dan merubah program audit sehingga rencana yang telah disusun sebelumnya harus senantiasa dimutakhirkan. Beberapa contoh dari dampak perkembangan tersebut antara lain perpanjangan waktu penugasan audit investigatif, penambahan alokasi anggaran, perubahan personil tim dan perubahan ruang lingkup penugasan. Hal ini dialami oleh kasus Kegiatan Jasa Sewa Billboard untuk Pemerintah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2014 yang mengalami satu kali perpanjangan audit investigatif yang terjadi karena adanya pihak-pihak yang ternyata sulit untuk dilakukan konfirmasi dan permasalahan lokasi dari kegiatan yang tersebar sehingga waktu yang dialokasikan tidak mencukupi (Auditor BPKP Perwakilan Jambi, 2016).

Hal yang sama juga terjadi pada kasus Dugaan Penyalahgunaan Anggaran di BAPEKANHUT (Badan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Kehutanan Dan Perkebunan) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2012 dimana penugasan audit investigatif mengalami dua kali perpanjangan dikarenakan jumlah data yang harus diproses diluar dugaan sehingga diperlukan anggaran waktu untuk menyelesaikan proses pengolahan data. Untuk kasus ini bahkan *output* yang telah dihasilkan dari penugasan audit tidak digunakan penyidik

karena kasus tersebut tidak jadi diangkat ke persidangan karena kebijakan dari pihak penyidik sendiri (Auditor BPKP Perwakilan Jambi, 2016).

Berdasarkan Standar Audit APIP dijelaskan bahwa perencanaan audit investigatif dibuat dengan tujuan untuk meminimalkan tingkat risiko kegagalan dalam melakukan audit investigatif serta memberikan arah agar pelaksanaan audit investigatif efisien dan efektif. Berawal dari perencanaan, dapat terlihat apakah suatu proses audit dapat berlangsung dengan efektif, efisien, dan berkualitas.

Uswatun Hasanah (2013:575) dalam penelitiannya memberikan contoh dari Inspektorat Kabupaten Jepara yang terdiri dari 26 orang personil auditor yang pernah melaksanakan kegiatan audit menunjukkan bahwa perencanaan audit memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan dari sisi efisiensi dan efektivitas Cipta Dwi Sastra (2010:32) dalam penelitiannya menjelaskan tahap perencanaan audit investigatif bertujuan untuk menekan serendah mungkin resiko kegagalan dan memberikan arahan agar penugasan berjalan dengan efisien dan efektif. Di BPK RI pada tahap perencanaan disusun hipotesis, program pemeriksaan, penentuan kebutuhan sumber daya, dan penerbitan surat tugas sebagai tahapan penting untuk menjadi dasar yang kuat dalam melaksanakan penugasan investigatif. Permasalahan yang sering timbul adalahnya minimnya jumlah sumber daya pemeriksa BPK yang memiliki kemampuan di bidang investigasi sehingga tahap perencanaan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi ketimpangan penugasan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya Siska Sari Widuri (2010:22) dengan penelitiannya yang menjelaskan bahwa tahap perencanaan audit investigatif di BPKP tidak menjamin berjalannya penugasan audit investigatif yang efektif,

karena efektivitas penugasan audit investigatif ditunjukkan oleh LHAI yang terbit dan telah digunakan penyidik untuk menyelesaikan kasus tindak pidana korupsi. Hal ini diperjelas lagi oleh hasil analisa efektivitas yang menunjukkan terdapat LHAI yang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik ke persidangan meskipun penugasan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai perencanaan sehingga tahap perencanaan yang baik tidak mempengaruhi tingkat efektivitas selama penugasan tersebut dapat memberikan *output* berupa LHAI sesuai dengan target penugasan yang diberikan dan dapat digunakan oleh penyidik.

Kompetensi dan pengalaman merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penugasan audit. Kompetensi menurut Susanto, 2000 (dalam Justiana, 2010:32) adalah karakteristik-karakteristik yang mendasari individu untuk mencapai kinerja superior, dalam hal ini kompetensi termasuk pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang berhubungan dengan pekerjaan, serta kemampuan yang dibutuhkan untuk pekerjaan-pekerjaan non rutin. Dengan kompetensi yang mencukupi dan sesuai, seseorang akan memiliki pengetahuan untuk dapat menyelesaikan suatu penugasan lebih baik dibandingkan apabila seseorang tidak memiliki kompetensi yang mencukupi.

Kompetensi juga dituntut sebagai salah satu kriteria untuk melaksanakan audit dimana menurut Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) 2200 menyatakan bahwa Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. SPKN 2007 juga mendukung pernyataan ini dengan menyatakan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh personil yang memiliki kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai sebagai

salah satu bentuk tanggung jawab organisasi pemeriksa dalam melaksanakan audit sehingga terlihat adanya hubungan antara kompetensi dan efektivitas penugasan audit. Di bidang audit investigatif kompetensi membantu penugasan audit dengan memberikan kemampuan untuk auditor dalam menemukan indikasi-indikasi terjadinya pelanggaran berdasarkan teknik audit investigatif yang pernah dipelajari dan kemampuan teknis lainnya yang telah disertifikasi yang akan mempermudah auditor dalam menyelesaikan penugasannya.

Hubungan antara kompetensi dan audit telah diteliti sebelumnya oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian dengan objek Kantor Akuntan Publik (KAP) di Wilayah Bandung yang dilakukan oleh Amalia Dewi Rosalina(2014:59) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit secara simultan/bersamaan dengan variabel lainnya maupun parsial/individu karena dengan adanya kompetensi yang mencukupi akan mempermudah auditor dalam memecahkan masalah yang dihadapi saat melaksanakan proses audit dan dapat mengikuti perkembangan yang terjadi dalam proses tersebut sehingga dapat dicapai hasil audit yang berkualitas. Pernyataan ini didukung oleh penelitian Lauw Tjun Tjun, Dkk.(2013:53) dengan objek KAP di Wilayah Jakarta Pusat. Pada penelitian ini kompetensi secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Dalam audit investigatif kompetensi yang ada akan mempermudah auditor dalam menemukan indikasi-indikasi kecurangan yang ada pada suatu kasus dan apabila terjadi perkembangan-perkembangan tertentu terhadap kasus yang akan mempengaruhi proses audit, auditor akan mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Contoh: Awal suatu kasus dugaan tindak pidana

korupsi diindikasikan atas penggelapan dana perjalanan dinas di suatu instansi daerah, setelah dipelajari mengenai sistem pengelolaan anggaran yang ada ditemukan bahwa juga telah terjadi penggelapan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa(PBJ). Apabila auditor terkait tidak memiliki kompetensi di bidang PBJ maka atas perkembangan kasus ini tidak dapat dilanjutkan oleh auditor terkait, harus menggunakan jasa ahli PBJ untuk menjaga kredibilitas hasil audit. Dengan penggunaan jasa ahli berarti akan memakan biaya lebih dan waktu lebih dalam penugasan audit, dan apabila terjadi perbedaan asumsi antara ahli dan auditor perlu dilaksanakan diskusi lebih lanjut mengenai kesimpulan yang diperoleh ahli tersebut sehingga mengurangi efektivitas dalam penugasan Audit investigatif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Malem Ukur Tarigan Dkk.(2013:829) berpendapat dalam penelitiannya dimana kompetensi di sini berpengaruh positif terhadap kualitas audit apabila diterapkan secara simultan dengan variabel lainnya namun tidak berpengaruh terhadap kualitas audit apabila dilakukan pengujian secara parsial. Hal yang sama juga dialami oleh Fransiska Kovinna(2014:10) dengan penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit dan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kualitas audit.

Pengalaman adalah suatu proses pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun informal atau dapat diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Dalam hubungannya dengan efektivitas penugasan audit pengalaman berarti membantu auditor dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara akurat, dan mencari penyebab

kesalahan karena auditor sebelumnya telah mengalami hal yang serupa dengan permasalahan yang dialami sehingga membantu auditor dalam mengambil keputusan dengan lebih baik dan dapat memanfaatkannya untuk mencapai penugasan audit yang efektif.

Pengalaman menurut Edelwis, Sukirman(2015:8) menyimpulkan bahwa pengalaman berpengaruh positif terhadap kualitas audit, karena menurut hasil penelitian auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan yang lebih besar dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit dan pengalaman auditor akan menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam mengambil keputusan penugasan. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Nur Aini(2009) dalam penelitiannya menyatakan pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Semakin berpengalaman seorang auditor maka semakin mampu ia menghasilkan kinerja yang lebih baik dalam tugasnya yang semakin kompleks, termasuk dalam pengawasan dan pemeriksaan selama berlangsungnya audit.

Pada audit investigatif dalam Fraud Audit(2008:42) pengalaman berarti kecakapan dalam menyelesaikan audit dan variasi kasus yang telah dialami. Kecakapan di sini berarti lebih menguasai kemampuan non teknis seperti teknik komunikasi, wawancara, menemukan whistle blower, dan lain sebagainya. Variasi kasus Audit investigatif dapat berupa pihak yang berkepentingan, kecenderungan titik pelanggaran, modus operandi, dan indikasi-indikasi lainnya. Dengan banyaknya pengalaman yang dimiliki seorang Auditor Investigatif, maka semakin banyak pula kecakapan non teknis dan model kasus yang dikuasai sehingga setiap penugasan Audit investigatif terlaksana dengan efisien dan efektif.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian Fransiska Kovina(2014:10) menyatakan bahwa, pengalaman berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit apabila dianalisa secara simultan namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit apabila dianalisa secara parsial. Pernyataan ini juga didukung oleh Dita Justiana(2010:83) bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap opini audit yang disebabkan mayoritas responden adalah auditor junior dengan pengalaman dibawah tiga tahun. Elisha Muliani Singgih Dkk(2010:19) juga mendukung pernyataan ini bahwa pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit karena sebagian besar respondennya adalah auditor dengan masa kerja di bawah tiga tahun sehingga respon untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan pengalaman cenderung menghasilkan jawaban yang tidak positif.

Peningkatan kualitas penugasan audit sangat dipengaruhi oleh proses kendali mutu. Aktivitas kendali mutu untuk mencapai penugasan yang efektif dan efisien adalah dengan kegiatan supervisi. Menurut PERKA BPKP Nomor 13 Tahun 2014 Supervisi adalah tindakan review berjenjang dan periodik agar menjamin bahwa perkembangan audit investigatif tetap efisien, efektif, mendalam, objektif, dan sesuai dengan ketentuan.

Supervisi dalam audit bertujuan untuk memastikan sasaran audit tercapai, terjaminnya kualitas dan meningkatnya kemampuan auditor. Aktivitas supervisi dalam penugasan audit sebenarnya dilakukan secara berjenjang mulai dari ketua tim, pengendali teknis sampai dengan pengendali mutu tim audit. Namun pada prakteknya kegiatan supervisi lebih ditekankan pada pengendali teknis. Pengendali teknis sebagai supervisor secara umum lebih berpengalaman

dibandingkan ketua tim karena telah menerima pendidikan lebih dibandingkan ketua tim dan telah memiliki masa kerja yang lebih juga sehingga diharapkan dapat melaksanakan kendali mutu lebih baik dibandingkan ketua tim. Prosedur yang dilaksanakan di lapangan seperti lembar program audit ditandatangani oleh ketua tim dan pengendali teknis tanpa adanya pengendali mutu. Hal ini menjadikan jabatan supervisor atau pengendali teknis merupakan posisi sentral dalam pelaksanaan supervisi penugasan audit ini. Oleh karena itu, kualitas penugasan audit sangat dipengaruhi oleh kompetensi seorang supervisor/pengendali teknis dalam melakukan kegiatan supervisi.

Kompetensi yang diharapkan adalah seorang pengendali teknis harus mampu melakukan supervisi mulai dari tahap persiapan audit, pelaksanaan audit sampai dengan tahap penyelesaian audit. Supervisi menurut Ahmad Rifan(2015:72), dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa supervisi audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Syamsul Bahri(2010:90) menyatakan bahwa tindakan Supervisi berpengaruh baik terhadap kinerja auditor junior.

Wulandari Hermawati(2010:55) memperkuat pentingnya pengendali teknis yang berkualitas dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwa aktivitas supervisi di BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur oleh pengendali teknis(*supervisor*) yang bersertifikasi akuntan, memiliki gelar, berpengalaman, dan mampu memberikan instruksi akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dibandingkan pengendali teknis yang tidak. Namun untuk tahapan perencanaan penugasan tidak ada dilakukan aktivitas pengendalian karena dokumentasi perencanaan dikerjakan ketika tim telah memulai penugasan. Hal ini tidak

mempengaruhi kinerja tim audit di lapangan dan penugasan audit tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat disimpulkan aktivitas supervisi tidak mempengaruhi kinerja penugasan audit di BPK RI Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang telah diuraikan terlihat adanya perbedaan kesimpulan dan permasalahan yang terjadi dikarenakan adanya faktor perencanaan, kompetensi, pengalaman dan supervisi yang mempengaruhi efektivitas penugasan audit. Peneliti ingin menguji lebih lanjut mengenai pengaruh variabel tersebut melalui replikasi penelitian terdahulu dengan menjadikan kegiatan perencanaan, kompetensi, dan pengalaman sebagai variabel independen, efektivitas penugasan audit sebagai variabel dependen, dengan Aktivitas Supervisi sebagai variabel moderator perencanaan, bukan sebagai salah satu variabel independen serta bidang audit yang akan diteliti adalah bidang audit investigatif, bukan audit laporan keuangan maupun audit kinerja.

Penulis di sini ingin mengetahui bagaimana aktivitas supervisi tersebut memoderasi hubungan antara perencanaan dengan efektivitas penugasan sebagai faktor yang mempengaruhi kedua variabel tersebut secara langsung, dan kegiatan penerapan perencanaan, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit investigatif yang berbeda dengan perencanaan, kompetensi, dan pengalaman yang dibutuhkan proses audit pada umumnya sehingga penulis ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Perencanaan, Kompetensi, dan Pengalaman Audit investigatif terhadap efektivitas penugasan Audit investigatif dengan Aktivitas Supervisi sebagai variabel moderating pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dilaksanakan penelitian oleh penulis sebagai berikut:

1. Apakah aktivitas perencanaan penugasan audit investigatif berpengaruh terhadap efektivitas penugasan audit investigatif ?
2. Apakah kompetensi audit investigatif berpengaruh terhadap efektivitas penugasan audit investigatif ?
3. Apakah pengalaman audit investigatif berpengaruh terhadap efektivitas penugasan audit investigatif ?
4. Apakah aktivitas supervisi memoderasi pengaruh perencanaan penugasan audit investigatif terhadap efektivitas penugasan audit investigatif ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Menguji dan membuktikan pengaruh perencanaan audit investigatif terhadap pelaksanaan penugasan audit investigatif;
2. Menguji dan membuktikan pengaruh kompetensi audit investigatif terhadap efektivitas penugasan audit investigatif;
3. Menguji dan membuktikan pengaruh pengalaman audit investigatif terhadap efektivitas penugasan audit investigatif;
4. Menguji dan membuktikan apakah aktivitas supervisi memoderasi pengaruh perencanaan penugasan audit investigatif terhadap efektivitas penugasan audit investigatif.

Manfaat yang diharapkan dengan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1.3.1 Kegunaan teoritis

1. Sebagai informasi tambahan untuk para pembaca yang ingin mengetahui lebih mengenai perencanaan audit investigatif;
2. Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai perencanaan, kompetensi, pengalaman, supervisi, dan efektivitas di bidang audit investigatif.

1.3.2 Kegunaan praktis

1. Sebagai bahan masukan bagi Perwakilan BPKP Provinsi Barat dan auditornya dalam menjaga kualitas pengawasannya dalam hal ini pengawasan di bidang audit investigatif;
2. Memberikan masukan bagi para auditor investigatif dalam melaksanakan pekerjaannya.

1.3.3 Bagi penulis

1. Menambah pengetahuan dan wawasan di bidang audit investigatif dan hubungannya dengan variabel-variabel terkait;
2. Mengaplikasikan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam praktek lapangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun agar penulisan yang dilakukan menjadi lebih terarah. Tulisan ini terdiri dari lima bab yaitu pendahuluan, landasan teori, tinjauan kajian terdahulu, pengembangan hipotesis, metode penelitian, analisis data, pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan serta keterbatasan saran dengan penjelasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Penjelasan latar belakang masalah yang menggambarkan fenomena yang terkait dengan masalah tersebut. Dengan latar belakang dapat disusun rumusan masalah yang spesifik sebagai acuan hipotesis. Pada bab ini juga akan dijelaskan mengenai tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II : Landasan Teori

Menjabarkan mengenai dasar-dasar materi yang dijadikan dasar pemikiran penelitian. Terdiri atas penjelasan mengenai teori perencanaan audit investigatif, kompetensi, pengalaman, efektivitas audit, dan aktivitas supervisi. Terdapat juga penjelasan mengenai kajian terdahulu yang mendukung maupun tidak mendukung hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Menjelaskan mengenai variabel penelitian dan definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian. Kemudian dijelaskan mengenai karakteristik sampel, jenis dan sumber daya, dan metode pengumpulan data. Selanjutnya pembahasan mengenai metode analisis yang digunakan untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan dari objek penelitian berupa sampel.

Bab IV : Hasil dan Analisis

Berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. Selain itu, penulis juga akan menguraikan keterbatasan yang terjadi dalam penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya.

